



Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelayanan KB

Urip Tri Wijayanti [✉], Nadia Ayu Irma Nindiyastuti¹, Najib Najib¹

¹Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 31 Agustus 2021

Disetujui Oktober 2021

Dipublikasikan Juli 2021

Keywords:

*family planning services,
family planning policies,
COVID 19 pandemic*

DOI:

<https://doi.org/10.15294/higeia/v5i3/49552>

Abstrak

COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Untuk menghadapi wabah tersebut dilakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai pencegahan penularan COVID-19. Kondisi ini menyebabkan pembatasan dalam pelayanan KB. Tujuan penelitian ini menganalisis perbedaan layanan KB sebelum dan sesudah era pandemi COVID-19. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Responden penelitian adalah semua pasangan usia subur (PUS) di Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020. Penelitian berdasarkan data sekunder dari laporan statistik rutin perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa era pandemi COVID-19 berdampak terhadap pelayanan KB di Jawa Tengah, yaitu terjadinya penurunan pelayanan KB. Jumlah kepesertaan KB aktif mengalami penurunan dan kenaikan selama era pandemi COVID-19. Hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah kepesertaan KB aktif pada metode kontrasepsi suntikan, pil, MOW, dan MOP serta kenaikan jumlah kepesertaan KB aktif pada metode kontrasepsi IUD, implan, dan kondom. Rekomendasi pemerintah khususnya BKKBN terus berupaya mengadakan terobosan-terobosan untuk kegiatan pelayanan KB serentak dalam berbagai program. Masyarakat dapat mematuhi kebijakan dan mengikuti berbagai layanan KB yang ada sehingga dapat mengantisipasi kasus *baby boom* pasca pandemi COVID-19.

Abstract

COVID-19 has been declared a world pandemic by WHO. To deal with this outbreak, a large-scale social restriction (PSBB) policy was implemented to prevent the transmission of COVID-19. This condition causes restrictions in family planning services. The objective of this study is to analyze the differences between family planning service before and after the covid 19 pandemic era. The data collection was conducted by using descriptive quantitative approach. The respondents of the study were all couples of reproductive ages in central Java in 2019 and 2020. The study was based on the secondary data from the routine statistical reports of the BKKBN representatives of central java in 2020 and 2021. The finding of the study states that covid 19 pandemic era impact to the family planning service in central Java was the decrease of family planning service. The number of active family planning participants has decreased and increased during the covid 19 pandemic era. It can be seen from the decrease in the number of the active family planning participants on the injection contraceptive method, pill, women surgical contraceptive (MOW) and men surgical contraceptive (MOP) methods; and the increase in the number of active family planning participants on IUD method, implants, and condoms. The recommendation is that the government, especially the BKKBN, continues to make breakthroughs for family planning service activities simultaneously in various programs. The public can comply the policies and follow various existing family planning services so that they can anticipate the baby boom cases after the COVID-19 pandemic.

© 2021 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma
Jakarta Timur, 13650
E-mail: uriptrijavanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Bangga Kencana pada periode pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2015–2019 masih banyak menghadapi tantangan. Penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana (KB) sudah cukup baik, namun belum mampu mendukung tercapainya sasaran kinerja Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019. Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain kelahiran total (TFR) dengan target 2,1 pencapaian sebesar 2,32 kemudian masih tingginya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 11,3%; tingginya disparitas angka penggunaan kontrasepsi (CPR) dan *unmetneed* antarwilayah. Potensi permasalahan lain yang muncul dalam proses finalisasi dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah 2020-2024 adalah terjadinya pandemi COVID-19 secara global (Renstra BKKBN,2020).

COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Berdasarkan Keputusan nomor 13 A tahun 2020 oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana Indonesia ditetapkan berada pada status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Selain itu, ditetapkan pula Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 ini dilakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk pencegahan penularan COVID-19. Kondisi ini menyebabkan dampak terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (Kemenkes RI, 2020).

Dampak pelayanan KB di era pandemi COVID-19 adalah terjadi penurunan peserta KB pada bulan Maret 2020 apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2020 di seluruh Indonesia. Pemakaian IUD pada Februari 2020 sejumlah 36.155 akseptor turun menjadi 23.383 akseptor. Sedangkan pemakaian implan dari 81.062 akseptor menjadi 51.536 akseptor,

suntik dari 524.989 akseptor menjadi 341.109 akseptor, pil 251.619 akseptor menjadi 146.767 akseptor, kondom dari 31.502 akseptor menjadi 19.583 akseptor, MOP dari 2.283 akseptor menjadi 1.196 akseptor, dan MOW dari 13.571 akseptor menjadi 8.093 akseptor. Pada April terjadi penurunan peserta atau akseptor aktif sebesar 10% dibanding bulan sebelumnya, yaitu tercatat terdapat sekitar 26 juta peserta KB aktif, sedangkan bulan Maret sebesar 36 juta akseptor. Penurunan antar provinsi rata-rata 10%-15% dari akseptor sebelumnya. Dari data tersebut, terdapat sekitar 10 juta pasangan tidak menggunakan alat kontrasepsi pada masa pandemi yang menghasilkan 7 juta kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Dari total angka tersebut, sekitar 25% merupakan pasangan usia subur (PUS) yang berusia 20 tahun-35 tahun atau sekitar 2,5 juta PUS (Utama A, 2020).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan terjadinya penurunan sebanyak 1.179.467 pelayanan program KB selama Januari-April 2020 di Indonesia. Angka akseptor di Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Maret 2020, pelayanan KB turun sekitar 4.000 akseptor, namun April naik menjadi 4.700 akseptor. Sedangkan, Mei akseptor KB kembali turun cukup besar hingga 16 ribu akseptor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dini, L.I. dkk, (2016) akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) adalah ketidaksiapan menjadi seorang ibu, antara lain dapat berpeluang tidak melakukan pemeriksaan selama kehamilan, tidak memberikan ASI eksklusif, dan tidak memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Selain itu, menurut Amalia, E.H. (2017) dampak lain dari KTD adalah mengalami komplikasi selama persalinan, berat badan bayi yang dilahirkan rendah, dan aborsi.

Riset UNFPA (organisasi PBB untuk kependudukan) memperkirakan akan ada sekitar 11 juta kehamilan tidak diinginkan pada masa pandemi. Data ini adalah hasil riset di 114 negara termasuk Indonesia (Rahayu U, 2020). KTD dapat berdampak negatif dan dapat meningkatkan kematian serta kesakitan ibu dan

bayi baru lahir. Pada 2020-2021 di wilayah Asia Pasifik diperkirakan terdapat kasus KTD sebanyak 20,7 juta yang dapat mengakibatkan angka kematian ibu sebesar 173.000. Keikutsertaan dalam layanan KB dapat berperan menurunkan kematian ibu hingga 40%. Di Indonesia angka kematian ibu sebesar 305 perkelahiran hidup atau 2 kematian ibu per jam, namun adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya penurunan dalam keikutsertaan KB (Hidayat M, 2020).

Penurunan keikutsertaan layanan KB diakibatkan oleh terhambatnya pelayanan KB khususnya bagi pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), adanya pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan kecuali dalam kondisi darurat, banyaknya aktifitas mudik masyarakat yang berasal dari zona merah dan membutuhkan pelayanan ke praktik mandiri bidan (PMB), serta kurangnya kesadaran PMB untuk melindungi dirinya dalam memberikan pelayanan (Listyawardani D, 2020).

Kondisi penurunan jumlah akseptor KB ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya lonjakan kelahiran bayi atau *baby boom* pasca pandemi COVID-19. Dalam upaya mengantisipasi adanya *baby boom* BKKBN memastikan keberlangsungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi (alakov) selama masa pandemi, antara lain dengan pelayanan KB bergerak dengan mengunjungi pasangan usia subur (PUS). Selain itu, BKKBN mengoptimalkan peran penyuluh keluarga berencana (PKB), meluncurkan informasi keluarga berencana yang masif dalam bentuk vlog dengan melibatkan publik figur, berkoordinasi dengan bidan untuk pelayanan KB, dan mendorong rantai pasok alat kontrasepsi hingga ke akseptor secara gratis. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan selama pandemi, menggunakan APD, masker dan menjaga jarak fisik (Gustina E, 2020).

Berbagai upaya dilakukan oleh BKKBN untuk dapat mengantisipasi peningkatan angka kelahiran pasca pandemi COVID-19. Salah satu

upaya tersebut adalah adanya kebijakan BKKBN berdasar SE Kepala BKKBN No. 8 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Kebijakan tersebut diantaranya menerapkan pembinaan dalam keikutsertaan ber-KB dan pencegahan putus pakai melalui berbagai media terutama media daring. Selain itu, penyuluh KB (PKB)/ penyuluh layanan KB (PLKB) melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat serta praktik mandiri bidan (PMB) dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB, serta pembinaan kesertaan ber-KB termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta konseling menggunakan media daring dan media sosial atau kunjungan langsung dengan memperhatikan jarak ideal (Biro Perencanaan BKKBN, 2020).

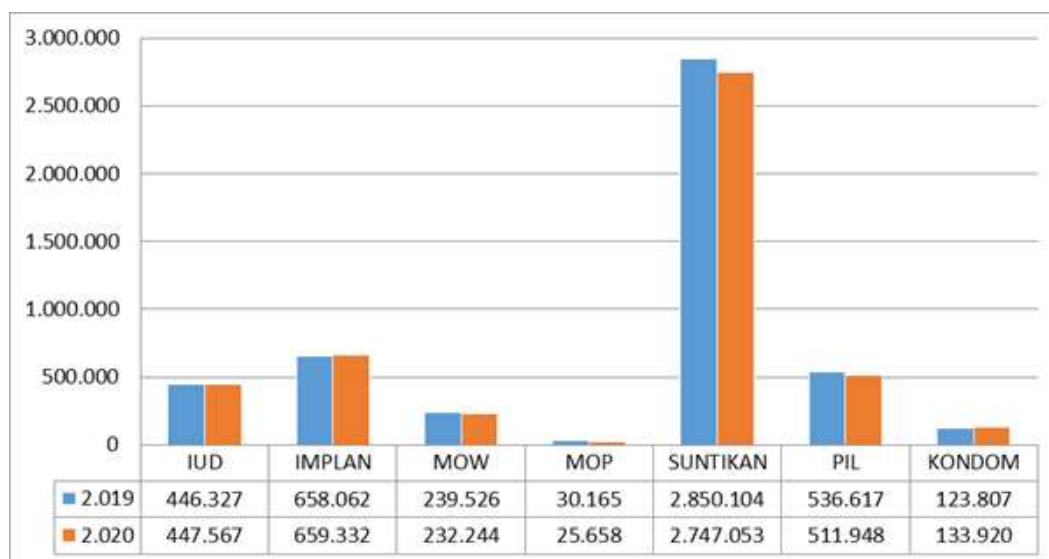
Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan kajian mengenai layanan KB di era pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan layanan KB sebelum dan sesudah era pandemi COVID-19

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Responden penelitian adalah semua pasangan usia subur (PUS) di Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020. Penelitian berdasarkan data sekunder dari laporan statistik rutin Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021. Data yang digunakan adalah data pencapaian peserta KB aktif pada PUS di Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020. Data diambil berdasarkan rentang waktu pelayanan KB sebelum COVID-19 (tahun 2019) dan selama era pandemi COVID-19 (tahun 2020) sehingga memungkinkan terjadinya fluktuasi angka pencapaian KB di Jawa Tengah. Data hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk diagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas hasil tentang pemakaian kontrasepsi dan kebijakan pelayanan



Gambar 1. Diagram pencapaian peserta KB aktif pada PUS tahun 2019 dan 2020 di Jawa Tengah

Sumber. Laporan Statistik Rutin BKKBN Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020

KB di era pandemi covid 19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan hasil, yaitu terjadi penurunan pemakaian pada sebagian besar metode KB di Jawa Tengah, namun terjadi peningkatan pemakaian pada metode kontrasepsi IUD (0,3%), implan (0,2%), dan kondom (7,6%).

Penurunan Pemakaian Kontrasepsi

Era pandemi COVID-19 telah membawa dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan. Pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi dampak tersebut, salah satunya adalah dengan membuat kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus rantai virus. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat

kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dampak kebijakan PSBB ini sejalan dengan data yang diperoleh dari BKKBN terdapat penurunan pada pelayanan KB, yaitu penurunan pemakaian kontrasepsi pada metode operasi pria (MOP) (15%), pil (4,6%), suntikan (3,6%), dan metode operasi wanita sebesar 3,0% (Gambar 2). Adanya peraturan PSBB berpengaruh terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan, termasuk pelayanan KB. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat seseorang banyak/sepanjang hari berada di rumah karena merasa takut. Selain itu, masyarakat mengikuti himbauan untuk mengurangi kunjungan ke dokter, kecuali pada kasus emergensi saja. Menurut Kusumaningsih (2020), apabila pandemi ini berlangsung sampai enam bulan, diprediksi akan terjadi kasus akseptor KB yang *drop out* sehingga dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) karena keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Di samping itu, pemberitaan di media yang dirasakan berlebihan membuat seseorang membatasi diri untuk kunjungan ke rumah sakit (Kusumaningsih P, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-

rata akseptor KB memilih KB suntik (44%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqmal R (2020) karena masyarakat merasa lebih aman dan praktis daripada metode KB lainnya. Demikian juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani A dkk (2019), manfaat lain dari metode kontrasepsi suntik adalah dapat digunakan setelah melahirkan, tidak memengaruhi kualitas dan volume ASI, merupakan metode yang lebih berjangka panjang daripada pil KB, merasa nyaman, dan biaya terjangkau. Namun, pada era pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan pemakaian KB suntik sebesar 3,6%. Salah satu alasan penurunan jumlah peserta KB karena diterapkannya *physical distancing*. Kunjungan ke fasilitas kesehatan harus dibatasi karena peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* dengan cara membatasi pasien per hari yang datang (Pambajeng GS dkk, 2020). Selain itu, masyarakat mengatakan saat masa pandemi ini takut untuk keluar rumah dan mengunjungi fasilitas kesehatan (Mandira TM dkk, 2020).

Era Pandemi COVID-19 berdampak pada indikator capaian program BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan laporan rutin BKKBN Provinsi Jawa Tengah, capaian angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive rate/ mCPR*) di Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 61,32. Hal ini masih di bawah target mCPR 2020 sebesar 63,93. Sementara itu, persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 29,03% dengan target 30,15% dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) semakin tinggi sebesar 11,3% dengan target 6,82%.

Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi

Berdasarkan data yang diperoleh, kenaikan pemakaian metode kontrasepsi terjadi pada jenis metode kondom sebesar 7,6% (Gambar 2). Akseptor KB kondom tidak harus datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan sehingga mengurangi terjadinya penularan COVID-19. Berdasarkan Purwanti S (2020) alasan berkunjung atau tidaknya pada layanan KB adalah adanya faktor

kekhawatiran risiko tertular COVID-19 lebih tinggi bila berkunjung ke fasilitas kesehatan. Selain itu, adanya kebijakan untuk tidak keluar rumah dan *work from home*. Kondisi ini menyebabkan akses akseptor KB ke layanan KB semakin sulit.

Pada pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terlihat kenaikan kepesertaan KB aktif, yaitu IUD sebanyak 0,3% dan implan 0,2% (Gambar 1). Metode MKJP tidak memerlukan kontak dengan pelayanan KB pada periode waktu yang pendek sehingga apabila habis masa efektifnya untuk sementara dapat menggunakan metode lain yang mudah didapatkan (Witono dan Parwodiwiyo S, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mandira TK dkk (2020), yaitu pada masa pandemi seperti saat ini, metode kontrasepsi suntik dapat diganti dengan implan yang bisa bertahan sampai tiga tahun atau spiral (IUD) yang bisa bertahan hingga lima tahun.

BKKBN telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kesertaan KB melalui berbagai kegiatan momentum seperti Pelayanan Sejuta Akseptor (PSA) dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Bulan Pelayanan MKJP pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Salah satu kegiatan momentum yang penting untuk kembali meningkatkan kesertaan KB pada masyarakat adalah peringatan Hari Vasektomi Sedunia. Pelayanan KB dalam rangka Hari Vasektomi Sedunia difokuskan pada pelayanan kontrasepsi mantap yaitu pelayanan KB MOW / Tubektomi dan pelayanan KB MOP / Vasektomi dengan target total sebesar 10.500 akseptor. Adapun rincian target untuk MOP adalah sebanyak 552 akseptor dan target MOW adalah sebanyak 9.948 akseptor. Rangkaian bulan pelayanan kontrasepsi mantap ini diselenggarakan sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan 30 November 2020 (Wulandari A, 2020).

BKKBN berupaya agar pelayanan KB terus berjalan. Dalam rangka rangka perayaan [hari keluarga nasional](#) (Harganas) ke-27, Badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) melaksanakan pelayanan KB sejuta

akseptor. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 08.00 sampai 15.00 WIB dan dilakukan pencatatan rekor museum rekor Indonesia (MURI) dengan target akseptor sebanyak 1.373.902 (Prasasti GD, 2020), sedangkan target di Jawa Tengah sebesar 147.654 akseptor (Istibsaroh N, 2020). Jawa Tengah dapat mencapai 173 ribu lebih akseptor (117%). Secara nasional, tercapai 140% artinya dari target satu juta akseptor tercapai 1,4 juta (Priyo, 2020). Petugas dan masyarakat dalam pelayanan KB tersebut menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) serta tetap menjaga jarak terutama bagi masyarakat yang melakukan antrian dan pelayanan pada meja petugas (Istibsaroh N, 2020).

Layanan KB kepada 147.654 akseptor KB tersebut dilakukan di kabupaten-kota di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Jepara telah berhasil mendapat peringkat yang terbaik dalam pelayanan serentak sejuta akseptor se-Jawa Tengah. Kabupaten Jepara berhasil mendapat 8.000 akseptor dari target 5.400 akseptor. Keberhasilan ini berkat kerja keras semua pihak, khususnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Selain DP3AP2KB Jepara, penghargaan juga diterima Kodim 0719/Jepara sebagai Kodim terbaik nasional atas partisipasinya dalam kegiatan Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-27 Tahun 2020 (jepara.go.id, 2020).

Penghargaan terbaik kedua didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Penambahan jumlah akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada kompetisi pelayanan KB sejuta akseptor berhasil melampaui target. Dari target 2.415 akseptor, mampu memperoleh 6.681 akseptor atau bertambah 311 persen (tegalkab.go.id, 2020). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora mendapat penghargaan terbaik ketiga dari kepala BKKBN Jawa Tengah atas capaiannya yang melebihi dari target, yaitu target sebesar 13

ribuan akseptor tercapai 14 ribuan. Keberhasilan pencapaian ini atas kerja sama bupati, Dinas Pengendalian Penduduk KB, Kodim 0721/Blora, Dinas Kesehatan, dan ikatan badan Indonesia (IBI) (Priyo, 2020).

Kebijakan pelayanan KB di Era Pandemi COVID-19

Pemerintah telah mengupayakan berbagai hal untuk mengantisipasi permasalahan adanya *baby boom* pasca pandemi COVID-19. Salah satu alternatif pemecahan masalahnya, yaitu menggunakan panduan penyusunan program kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Prinsip-prinsip dari panduan tersebut mendasari pelaksanaan penyusunan program kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana, yang terdiri dari koordinasi, kualitas pelayanan, komunikasi, partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas teknis dan manajemen, akuntabilitas, hak asasi manusia, serta advokasi. Sementara menurut Biro Perencanaan BKKBN dalam acara webinar kebijakan dan nonfisik TA 2020 dan rancangan kebijakan 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19, terdapat 5 strategi dalam mengantisipasi berjalannya pelayanan KB dalam kondisi pandemi COVID-19, antara lain yaitu pemberian penggunaan alokasi jangka pendek selama masa pandemik bagi akseptor aktif sehingga kondisi putus pakai dapat diminimalisir, pendataan oleh PLKB terhadap semua akseptor baik PA maupun PB di wilayah binaan, menggerakkan secara aktif pola KIE (media daring/media sosial) yang gencar untuk dapat memberikan pemahaman terhadap pengendalian untuk menjaga kondisi reproduksinya hingga tiba masa pelayanan, melakukan refocusing dana penggerakan pelayanan KB MKJP untuk mendukung pemberian APD berupa handscoon dan masker, insentif pelayanan suntik KB bagi praktik mandiri bidang yang melayani PUS miskin serta pembelian tambahan pil dan kondom, serta mendorong perwakilan BKKBN Provinsi melalui Surat Plt. Deputi Bidang KBKR nomor 457/I/KB.06.02/E1/2020 tanggal 9 April 2020 untuk menciptakan inovasi dan terobosan sesuai

kearifan lokal, bersama OPD KB dan mitra terkait lainnya dengan melaksanakan gerakan cegah putus pakai pemakaian kontrasepsi pada masa pandemi COVID-19 (Jatengprov, 2020).

Kebijakan pelayanan kebidanan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dalam era new normal adalah akseptor IUD atau implan dapat menunda untuk kontrol ke bidan jika tidak ada keluhan, akseptor suntik atau pil harus membuat perjanjian dengan bidan melalui telepon atau *whatschap* untuk kunjungan ulang (jika tidak memungkinkan dapat menggunakan kondom atau pantang berkala atau senggama terputus, bidan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan RT/ RW/ kepala desa/ pimpinan daerah setempat tentang status ibu apakah termasuk dalam isolasi mandiri (ODP/PDP), pelayanan KB diberikan sesuai standar dengan tetap menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19, akseptor dan pendampir serta semua tim kesehatan yang bertugas menggunakan masker dan menerapkan prinsip pencegahan penularan COVID-19, serta melakukan KIE, konseling kesehatan reproduksi dan KB secara online (Lawintono L, 2020).

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian pertama dampak era pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KB di Jawa Tengah adalah terjadinya penurunan pada pelayanan KB. Kedua jumlah kepesertaan KB aktif mengalami penurunan dan kenaikan selama era pandemi COVID-19. Penurunan jumlah kepesertaan KB aktif pada metode kontrasepsi suntikan, pil, MOW, dan MOP dan kenaikan jumlah kepesertaan KB aktif pada metode kontrasepsi IUD, implan, dan kondom.

Rekomendasi bagi pemerintah khususnya BKKBN terus berupaya mengadakan terobosan-terobosan untuk kegiatan pelayanan KB serentak dalam berbagai program. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mematuhi kebijakan dan mengikuti berbagai layanan KB yang ada sehingga dapat mengantisipasi kasus *baby boom* pasca pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E.H. dan Azinar, M. 2017. Kehamilan tidak diinginkan pada remaja. *Higeia: Journal of Public Health Research and Development*. 1(1), 1-7.
- Anggriani, A., Iskandar, D., Aharyanti, D. 2019. Analisis pengetahuan dan alasan penggunaan kontrasepsi suntik di masyarakat Panyileukan Bandung. *PHARMACY: Jurnal Farmasi Indonesia (Pharmaceutical Journal of Indonesia)*. 16(2), 315-325.
- Anugrahadi, S. 2020, 1 Juni. Kesertaan Ber-Kb Di Masa Pandemi COVID-19 Di Provinsi NTB. Diunduh dari <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1817>.
- Aqmal, S. 2020. Pendidikan keluarga dan partisipasi masyarakat pada program keluarga berencana di masa pandemi COVID-19 Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. *Tanjak: Journal of Education and Teaching*. 1(2), 213-222. DOI: <https://doi.org/10.35961/tanjak.v1i2.159>
- Biro Perencanaan BKKBN. 2020. Strategi BKKBN dalam mengantisipasi pandemi COVID-19. Diunduh dari <http://www.djpk.kemenu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/BOKB-pada-masa-COVID-19-ed.pptx>.
- Devi, R.A. dan Sulistyorini, Y. 2019. Gambaran kepesertaan keluarga berencana (KB) di Provinsi Jawa Timur tahun 2018. *Media Gizi Kesmas*. 8(2), 58-66. <http://dx.doi.org/10.20473/mgk.v8i2.2019.58-66>.
- Dini, L.I., Riono, P., dan Sulistyowati, N. 2016. Pengaruh status kehamilan tidak diinginkan terhadap perilaku ibu selama kehamilan dan setelah kelahiran di Indonesia (analisis data SDKI 2012). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. 7(2), 199-133.
- Gustina, E. 2020, 23 September. Situasi Terkini Penggunaan Kontrasepsi Masa Pandemi COVID-19. Diunduh dari <http://dktindonesia.org/wp-content/uploads/2020/09/Materi-Deputi-KBKR-DKT-final.pdf>.
- Herowati, D. dan Sugiharto, M. 2019. Hubungan antara kemampuan reproduksi, kepemilikan anak, tempat tinggal, pendidikan dan status bekerja pada wanita sudah menikah dengan pemakaian kontrasepsi hormonal di Indonesia tahun 2017. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*.

- 22 (2), 91-98. DOI: <https://doi.org/10.22435-hsr.v22i2.1553>.
- Hidayat, M. 2020, 24 September. Situasi Global Penggunaan Kontrasepsi di Masa Pandemi. Diunduh dari http://dktindonesia.org/wp-content/uploads/2020/09/PPT-Hari-Kontrasepsi-Sedunia-UNFPA_24092020.pdf.
- Istibsaroh, N. 2020, 29 Juni. Harganas, BKKBN berikan layanan KB Sejuta Akseptor. Diunduh dari <https://jateng.antaraneews.com/berita/319438/harganas-bkkbn-berikan-layanan-kb-sejuta-akseptor>.
- Jatengprov. 2020. Pandemi COVID-19, Peluang Kehamilan Meningkat. Diunduh dari <https://jatengprov.go.id/publik/pandemi-COVID-19-risiko-kehamilan-meningkat/>.
- Jepara.go.id. 2020. DP3AP2KB Jepara OPD KB Terbaik se-Jawa Tengah. Diunduh dari <https://jepara.go.id/2020/07/22/dp3ap2kb-jepara-opd-kb-terbaik-se-jawa-tengah>.
- Kemendes RI. 2020. Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Pandemi COVID-19. Diunduh dari https://infeksiemergingkemkes.go.id/download/Panduan_Pelayanan_KB_dan_Kespro_Dalam_Situasi_Pandemi_COVID-19.pdf.
- Kusumaningsih, P. 2020, 10 Mei. KB Alami, Alternatif Pengaturan Kehamilan Semasa Pandemi. Diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/qa3riw483/kb-alami-alternatif-pengaturan-kehamilan-semasa-pandemi>.
- Laporan Statistik Rutin BKKBN. 2021. BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Lawintono, L. 2020, 18 Juni. Kebijakan pelayanan kebidanan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dalam era new normal.
- Listyawardani, D. 2020, 5 Mei. Kebijakan Ketersediaan dan Supply Alat Kontrasepsi di Masa Pandemi COVID-19. Diunduh dari <https://www.ibi.or.id/media/Webinar%20IDM%202020/IDM%202020%20BKKBN.pdf>.
- Mandira, T.M., Fitriani, D., Ardi, N., Ver., Selvia, A. 2020. Edukasi program keluarga berencana (KB) pada wanita usia subur selama masa pandemi COVID-19. *Jurnal Abdi Masyarakat*. 1(1), 108-112.
- Nugroho, E., Nisa, A.A., Cahyati, W.H., Najib. 2021. Perception, mental health, and social media exposure on adolescent in Central Java during a COVID-19 pandemic. *Medico Legal Update*. 21(3).
- Nuryana, D. 2020, 11 Agustus. Potensi Terjadinya Baby Boom Setelah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Diunduh dari <https://rhknowledge.ui.ac.id/id/articles/detail/potensi-terjadinya-baby-boom-setelah-pandemi-COVID-19-di-indonesia-3b0182>.
- Pembajeng, G.S., Azalea, K.Z., Chrisiavinta, K., dan Hadayna, S. 2020, Desember. Perencanaan dan Evaluasi Program Keluarga Berencana Pada Masa Pandemi COVID-19. Diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/348049736>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Purwanti, S. 2020. Dampak penurunan jumlah kunjungan KB terhadap ancaman baby boom di era COVID-19. *Jurnal Bina Cipta Husada*. 16(2), 105-118.
- Prasasti, G.D. 2020, 29 Juni. Layanan KB Sejuta Akseptor, Cara BKKBN Peringati Hari Keluarga Nasional 2020. Diunduh dari [Error! Hyperlink reference not valid.](#)
- Priyo. 2020, 4 Agustus. Pemkab Blora Terima Penghargaan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor dari BKKBN. Diunduh dari <https://beritaboonegoro.com/read/20441-pemkab-blora-terima-penghargaan-pelayanan-kb-serentak-sejuta-akseptor-dari-bkkbn.html>.
- Rahayu, U. 2020, 18 Desember. BKKBN tekankan pentingnya program KB saat pandemi COVID-19. Diunduh dari <https://helohehat.com/infeksi/covid19/kb-pandemi-COVID-19/#gref>.
- Renstra BKKBN. 2020. Rencana Strategis 2020-2024 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Diunduh dari http://jateng.bkkbn.go.id/?page_id=1465.
- Syamsul, Bakri, B., Limonu, H.S. 2020. Penggunaan KB pada wanita kawin di perdesaan dan perkotaan (Studi hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo). *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 15(1), 71-84.
- Tegalkab.go.id. 2020. Terbaik Kedua di Jawa Tengah, Akseptor KB Kabupaten Tegal Sukses Lampau Target. Diunduh dari <http://setda.tegalkab.go.id/2020/07/27/terb>

- aik-kedua-di-jawa-tengah-akseptor-kb-kabupaten-tegal-sukses-lampau-target/.
- Utama, A. 2020, 8 Mei. Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Program KB di Indonesia. Diunduh dari <https://www.voaindonesia.com/a/dampak-pandemi-COVID-19-bagi-program-kb-di-indonesia/5411570.html>.
- Witono dan Parwodiwiyono, S. 2020. Kepesertaan keluarga berencana pada masa awal pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia*. 1(2), 77-88. DOI 10.37269/pancanaka.v1i2.47.
- Wulandari, A. 2020, 20 November. Peringatan Hari Vasektomi Sedunia di Masa Pandemi COVID-19. Diunduh dari <https://news.okezone.com/read/2020/11/20/1/2312951/peringatan-hari-vasektomi-sedunia-di-masa-pandemi-COVID-19>.